



Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi di Indonesia (Studi pada 6 Provinsi di Jawa)

Herman Cahyo Diartho^{1*}, Ma'ruf Hanuraga²

^{1,2} Jurusan ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Informasi Artikel

Sejarah artikel:

Diterima September 2018

Disetujui Oktober 2018

Dipublikasikan Oktober 2018

Keywords:

Province Minimum Wage,
Employment Absorption of
Construction Sector,
Panel Least Square (PLS)

ABSTRACT

Labor absorption can be measured by using the Provincial Minimum Wage (UMP) rate. The greater the value of wages earned is expected to affect the level of labor productivity. In this study aims to determine the effect of Province Minimum Wage on employment absorption of the construction sector. This research is qualitative and quantitative research. Qualitative analysis uses prescriptive analysis while quantitative analysis using method PanelLeast Square (PLS). The data used are time series (year 2006-2015) and cross section (6 provinces in Java). The type of data used in this study is secondary data obtained from the Central Statistic Agency (BPS) and the journal as a supporter. The analysis method used is linear regression analysis method of panel data with Random Effect Model (REM). The results show that, Minimum Wage variable Province has a positive influence with coefficient of 1.7671 and probability of 0.3538 to the absorption of labor in 6 provinces of Java Island in 2006-2015.

© 2018 MediaTrend

Penulis korespondensi:

E-mail: hermancahyodiartho@yahoo.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v13i2.4365>

2460-7649 © 2018 MediaTrend. All rights reserved.

Terakreditasi Kemenristekdikti Nomor 21/E/KPT/2018

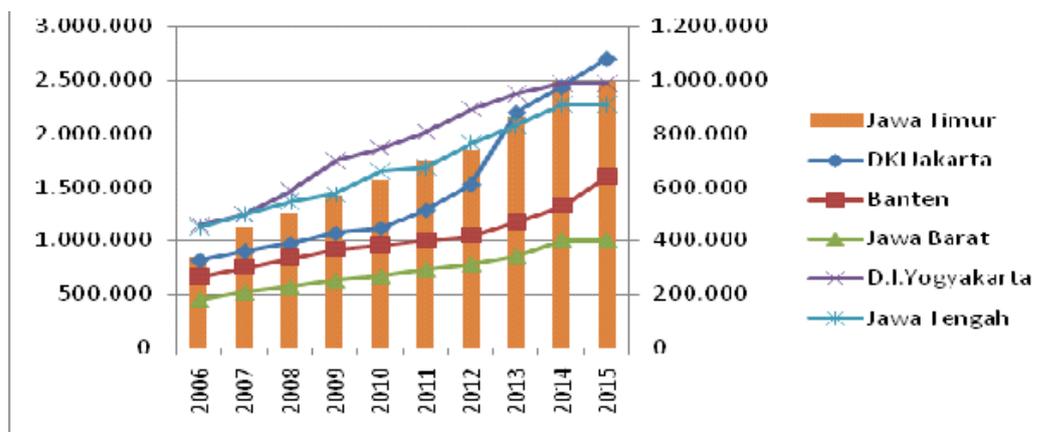
Pendahuluan

Upah dan tenaga kerja merupakan topik ekonomi yang terus menjadi bahan diskusi di kalangan ekonom dan peneliti. Pembatasan upah yakni, kebijakan upah minimum menjadi salah satu topik pembahasan di dalamnya. Peran upah minimum dalam pasar tenaga kerja dan perekonomian mendapat pandangan pro dan kontra baik secara teoritis maupun empiris (Herr, 2002; Kryriska dan Kopycinska, 2015). Secara teoritis, terdapat beberapa pandangan yang memperdebatkan hubungan antara upah minimum dan tenaga kerja. Pandangan ekonom Neoklasik menyatakan bahwa upah berperan penting terhadap pasar tenaga kerja, dimana upah ditentukan sama dengan produk marginal tenaga kerja (Bradley, 2007; Kryriska dan Kopycinska, 2015; Nikoloski, 2016). Pandangan tersebut menyatakan bahwa ketika upah dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif mengalami kenaikan, maka kenaikan tersebut akan berdampak pada penurunan pada sisi permintaan tenaga kerja (Fletwood, 2016).

Bertolak belakang dengan teori tersebut, Keynes menyatakan bahwa upah bukan merupakan faktor kunci yang memengaruhi permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja, sehingga apa-

bila terjadi kebijakan upah minimum dalam suatu perekonomian, maka hal tersebut kurang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sebangun dengan pemikiran Keynes, konsep segmentasi pasar tenaga kerja juga berpandangan bahwa dalam pasar tenaga kerja yang tersegmentasi, maka permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat upah, tetapi juga dipengaruhi oleh jenis pekerjaannya yang sesuai dengan segmen pasarnya (Jakstiene, 2010; Kumas, *et al.* 2014; Kryriska dan Kopycinska, 2015).

Upah minimum di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu (BPS, 2017). Gambar 1 menunjukkan variasi Upah Minimum Provinsi (UMP) enam Provinsi di Pulau Jawa. Berdasarkan Gambar tersebut, Upah Minimum Provinsi (UMP) dari ke enam Provinsi tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun 2006 hingga tahun 2015, walaupun terdapat sebagian Provinsi yang mengalami penurunan UMP pada tahun 2015. Penerapan UMP tertinggi dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebutuhan kelayakan hidup dan inflasi merupakan faktor penting yang timewa Yogyakarta tersebut (Merdekawaty, *et al.* 2016). Di sisi lain, Provinsi yang me-



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 (diolah)

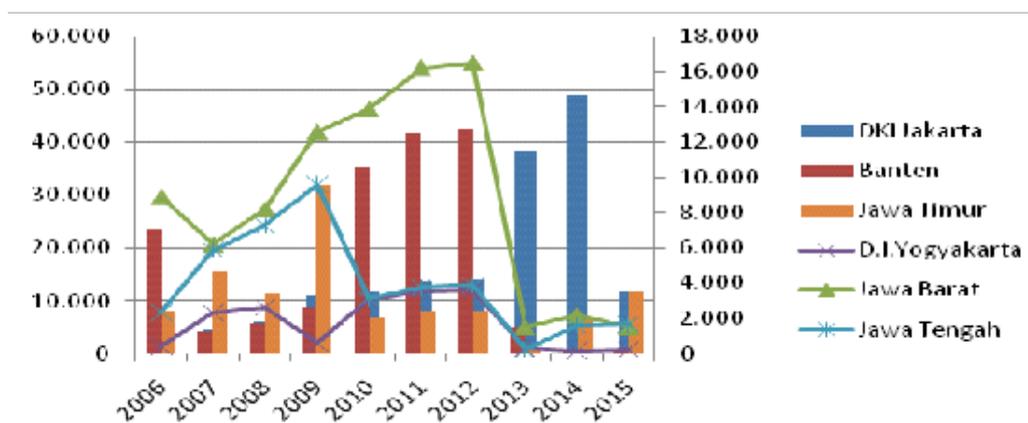
Gambar 1
Upah Minimum Regional/Provinsi 2006-2015 (rupiah)

memengaruhi UMP di Provinsi Daerah Is-
miliki tingkat UMP terendah berturut-turut
dari tahun 2006 hingga tahun 2015 adalah
Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Provinsi
Jakarta menunjukkan peningkatan UMP
yang cukup signifikan dari tahun 2013
hingga mencapai tingkat UMP tertinggi di
tahun 2015 dari lima Provinsi lainnya.

Infrastruktur merupakan faktor
penting dalam pembangunan perekono-
mian. Keberadaan infrastruktur dalam per-
ekonomian akan mendorong peningkatan
produktivitas faktor-faktor produksi, mem-
perlancar mobilitas penduduk, barang dan
jasa, juga memperlancar perdagangan

antar daerah. Ketersediaan infrastru-
ktur akan meningkatkan *output* ekonomi
dalam jangka pendek dan akan mening-
katkan produktivitas dalam jangka panjang
(Permana, 2010; Stupak, 2018). Pencia-
paian pembangunan infrastruktur tidak
terlepas dengan tingkat profesionalitas
pekerja dalam bidang tersebut (Adi dan
Adillah, 2012).

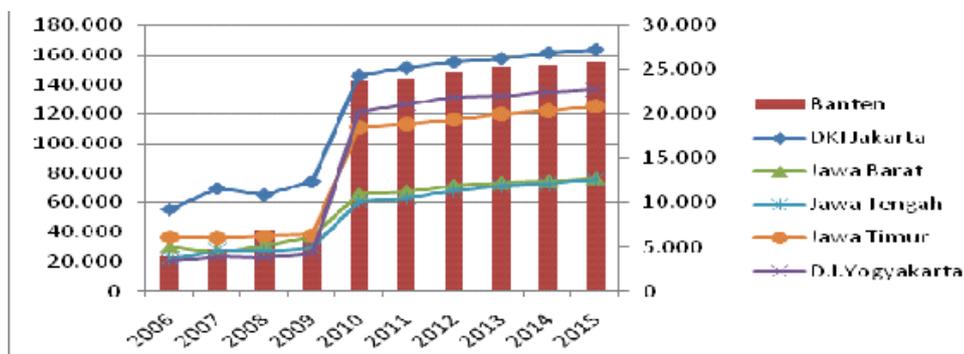
Gambar 2 menunjukkan fluktuasi
jumlah profesi tenaga ahli di perusahaan
konstruksi pada enam Provinsi di Pulau
Jawa. Jawa Barat merupakan Provinsi
yang memiliki profesi tenaga ahli konstruk-
si tertinggi sejak tahun 2006 hingga tahun



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 (diolah)

Gambar 2

Profesi Tenaga Ahli di Perusahaan Konstruksi Menurut Provinsi di Pulau Jawa 2006-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 (diolah)

Gambar 3

Pekerja Tetap di Perusahaan Konstruksi Menurut Provinsi di Pulau Jawa 2006-2015

2012. Jumlah profesi tenaga ahli pada bidang konstruksi di Provinsi Jawa Barat kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 hingga tahun 2015.

Pada sisi lain, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi yang memiliki jumlah profesi tenaga ahli di bidang konstruksi terendah dari enam Provinsi di pulau Jawa. Apabila dilihat dari pertumbuhan profesi tenaga ahli di bidang konstruksi dari enam provinsi di Pulau Jawa, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan terbaik di antara lima Provinsi lainnya.

Gambar 3 menunjukkan dinamika atau pergerakan jumlah pekerja tetap perusahaan konstruksi pada enam Provinsi di Pulau Jawa. Berdasarkan Gambar 3, jumlah tenaga kerja tetap bidang konstruksi Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi pada tahun 2006 hingga tahun 2009. Namun demikian, DKI Jakarta merupakan Provinsi yang memiliki jumlah tenaga kerja tetap bidang konstruksi tertinggi dibanding dengan lima Provinsi lainnya. Sedangkan lima Provinsi lainnya, yakni Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur memiliki jumlah tenaga kerja tetap bidang konstruksi yang cukup stabil pada tahun 2006 hingga tahun 2009. Kemudian, ke enam Provinsi tersebut mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2010 hingga tahun 2015.

Pandangan-pandangan teoritis, empiris dan fenomena yang ada di Indonesia, pada dasarnya memiliki keterkaitan. Secara teoritis, penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu teori menyebutkan bahwa penyerapan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh tingkat upah pada daerah atau negara tersebut. Pandangan teoritis lain menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak hanya dipengaruhi oleh upah, tetapi oleh kemampuan yang dimiliki oleh angkatan kerja dalam pasar tenaga kerja yang tersegmentasi. Begitu

pula dari pandangan empiris juga memiliki pandangan yang saling bertolak belakang. Beberapa teori menyatakan bahwa perubahan tingkat upah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, ada beberapa bukti kuat yang menunjukkan bahwa penerapan upah sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Kedua *gap* tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia, khususnya bidang konstruksi, dimana tenaga kerja pada bidang tersebut dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum regional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja tetap pada bidang konstruksi dan diikuti pergerakan fluktuatif oleh penyerapan tenaga kerja ahli dan pekerja tetap bidang konstruksi pada enam Provinsi di Pulau Jawa. Fenomena tersebut pada akhirnya menjadi alasan yang melatarbelakangi terkait pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor konstruksi di pulau Jawa.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perkembangan ketenagakerjaan dari ke enam provinsi di pulau Jawa?, Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau Jawa?. Kemudian tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan ketenagakerjaan dari ke enam provinsi di pulau Jawa dan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional/Provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau Jawa.

Metodologi Desain Penelitian

Penelitian ini diawali dengan mencari data yang sesuai dengan judul atau tema yang diangkat, dimana dalam pene-

litian ini mengambil tema untuk menganalisis adanya pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi di Indonesia yang diambil yaitu 6 provinsi di pulau Jawa. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah data upah minimum provinsi tahun 2006 hingga 2010 dan data penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut provinsi dan lapangan pekerjaan utama sektor konstruksi tahun 2006 hingga 2010.

Sebelum dilakukan pengujian model data panel dilakukan uji stasioneritas data yang menggunakan uji unit *root Augmented Dickey-Fuller*. Terdapat tiga tingkatan dalam pengujian ini yaitu level, *first difference*, dan *second difference* dengan kategori *non intercept*, dan *trend intercept*. Maksud dari tingkatan tersebut yaitu apabila data pada tingkat level belum stasioner maka dilanjutkan pada tingkat *first difference*, dan jika masih dirasa belum stasioner juga maka dilanjutkan pada tingkat *second difference* hingga data terstasionerkan pada tingkatan yang sama. Disarankan apabila data stasioner pada tingkat *second difference* dilakukan penambahan data karena kemungkinan hasil lebih besar. Setelah data stasioner, dilanjutkan dengan uji kointegrasi dengan tujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan jangka panjang antar variabel.

Setelah melakukan uji stasioneritas dan kointegrasi tahap selanjutnya adalah mengestimasi model data panel yang dibagi menjadi tiga model yaitu *Panel Least Square*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Dalam memilih ketiga model tersebut digunakan pula tiga pengujian, diantaranya adalah uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier*. Pengujian terakhir adalah uji asumsi klasik yang terbagi atas uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas. Apabila semua tahap dalam pengujian telah terpenuhi, proses selanjutnya yang merupakan proses terakhir dari rangkaian pengujian adalah

interpretasi dan justifikasi hasil.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi penelitian, yang dikumpulkan melalui studi *literature* terhadap publikasi dari instansi terkait dan jurnal-jurnal ilmiah dan lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Secara umum sumber data penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik per provinsi di Pulau Jawa.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini : (1) Data Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama Sektor Konstruksi tahun 2006 -2015, dan (2) Data Upah Minimum Provinsi tahun 2006 – 2015

Metode Analisis Data

Metode *Panel Least Square* (PLS). Model ini dikenal dengan estimasi *Common Effect* yaitu teknik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* (Gujarati dan Porter, 2009). Model ini hanya menggabungkan kedua data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) karena menggunakan kuadrat kecil biasa. dimana TsK adalah Tenaga kerja sektor konstruksi, UMP adalah Upah Minimum Provinsi, α adalah Konstanta, i adalah Provinsi, t adalah Periode waktu, et adalah Variabel Pengganggu

Dengan penggunaan data panel dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa pendekatan metode teknik analisis. **Pertama**, *Fixed Effect Model* (FEM): pada pendekatan model efek tetap, diasumsikan bahwa *intercept* dan *slope* (\square) dari persamaan regresi (model) dianggap konstan baik antar unit *cross section* maupun antar unit *time series*. **Kedua**, *Random*

Effect Model (REM): dalam mengestimasi data panel melalui pendekatan FEM, variabel *dummy* menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan variabel residual yang dikenal dengan pendekatan *random effect model* (REM).

Prosedur dalam pengujian *Panel Least Square* (PLS) dalam suatu penelitian, terdapat suatu urutan dimana pengujian tersebut guna mengetahui tujuan masing-masing pengujian terhadap data. Pengujian tersebut antara lain adalah; 1) Uji Stasioneritas Data, guna melihat fluktuasi sebuah data. Data dikatakan stasioner apabila memenuhi asumsi stasioneritas yakni data harus sesuai dengan syarat *central limit theorem* (CLTM). 2) Uji Kointegrasi, Variabel yang semuanya secara individu I(1) dan berbeda-beda akan menyimpang bersama. Untuk beberapa kombinasi linier dari satu kumpulan I(1) menjadi I(0) maka variabel dikatakan terkointegrasi. 3) Uji *Chow*, adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel lebih baik menggunakan *fixed effect model* atau *common effect model* dengan asumsi bahwa *unit cross section* memiliki perilaku yang cenderung sama tidaklah realistis dikarenakan *unit cross section* memiliki perilaku yang berbeda (Juanda dan Junaidi, 2012). 4) Uji *Hausman* merupakan pengujian statistik untuk memilih apakah model *fixed effect* atau model *random ef-*

fect yang paling tepat digunakan dalam estimasi data panel. Uji *Hausman* memberikan sebuah penilaian menggunakan *Chi-square statistics*. 5) Uji *Lagrange Multiplier* (LM) Uji *Chow* adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel lebih baik menggunakan *fixed effect model* atau *common effect model* dengan asumsi bahwa *unit cross section* memiliki perilaku yang cenderung sama tidaklah realistis dikarenakan *unit cross section* memiliki perilaku yang berbeda (Juanda dan Junaidi, 2012). Adapun beberapa uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya : (1). Uji Multikolinieritas; (2). Uji Heterokedastisitas; dan (3). Uji Normalitas;

Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum data penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah tenaga kerja sektor konstruksi dan UMP tiap penyerapan tenaga kerja. Hasil analisis statistika deskriptif menggambarkan perilaku dari variabel yang digunakan.

Dalam Tabel 1 dijelaskan bahwa variabel TK konstruksi dan UMP memiliki daya saing yang digambarkan melalui interval nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum TK konstruksi sebesar 302760.0 sedangkan minimumnya

Tabel 1
Hasil Analisis Statistika Deskriptif Penyerapan Tenaga Kerja

Analisis	TK.Konstruksi	UMP
Mean	41826.91	-173.7963
Median	13850.50	567.5000
Maximum	302760.0	24354.00
Minimum	-253540.0	-37308.00
Std.Deviasi	105677.8	7634.421
Obs.	54	54

Sumber : data diolah, 2018

-253540.0 lalu nilai maksimum dari variabel UMP sebesar 24354.00 sedangkan minimumnya sebesar -37308.00. Persebaran data variabel dapat dilihat melalui mean dan standar deviasi. Jika dirasa kecil maka persebaran data tersebut kurang begitu baik.

Analisis Panel Least Square (PLS)

Analisis PLS digunakan untuk menjawab pertanyaan empiris dan yang kedua yaitu bagaimana upah minimum provinsi memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

Uji Stasioneritas

Tabel 2 memaparkan bahwa hasil uji *unit root* untuk variabel TK dan UMP stasioner pada tingkat level, sedangkan TK stasioner pada tingkat *first difference* (1st difference). Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai probabilitas kurang dari alpha 5% (0.05).

Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Johansen. Metode Johansen terdapat tiga level yaitu 1%, 5%, dan 10%.

Tabel 2
Hasil Uji Unit Root Data Panel (TK dan UMP)

No.	Unit Root	Tingkat	Prob. TK	Prob. UMP
1	Levin, Lin, Chu, (LLC)	Level	0.9136*	0.0101
		1st Difference	0.0000*	0.0000*
2	Im Pesaran, Shim (IPS)	Level	0.9810*	0.1698
		1st Difference	0.0071*	0.0003*
3	Augmented Dickey Fuller (ADF)	Level	0.9640*	0.1945
		1st Difference	0.0036*	0.0003*
4	Phillip Perron (PP)	Level	0.9747*	0.4389
		1st Difference	0.0000*	0.0000*

*: stasioner 5%

Sumber : data diolah, 2018

Tabel 3
Hasil Uji Kointegrasi Data Panel

Keterangan	Metode	Nilai ADF Stat	Kointegrasi
Variabel	Pedroni	0.5503	Tidak Terkointegrasi
TK dan UMP	Kao	0.0668	Tidak Terkointegrasi
Enam provinsi	Fisher	0.5045	Tidak Terkointegrasi

Sumber : data diolah, 2018

Uji Panel Least Square (PLS)

Hasil analisis model panel *least square* menunjukkan bahwa variabel independen memengaruhi variabel dependen sebesar 0.22%. Hal ini dikarenakan nilai *adjusted R2* sebesar 0.0022. Selanjutnya hasil analisis model *fixed effect* menunjukkan bahwa variabel independen memengaruhi variabel dependen sebesar 3% yang ditunjukkan oleh nilai *adjusted R2* sebesar 0.0390. Sementara untuk model *random effect* pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 90%, dengan nilai *adjusted R2* sebesar 0.9036. Seluruh model menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berpengaruh secara positif dan tidak signifikan, hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas *f-statistic* yang lebih dari 5% (0.05).

Tahap selanjutnya yaitu dengan membandingkan masing-masing model guna mengetahui model terbaik yang digunakan sebagai estimasi permodelan panel VAR. Hasil uji *Chow* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model terbaik adalah model *Random Effect* karena nilai probabilitas *f-statistic* diatas 5% (0.05) yaitu sebesar 0.3638. selanjutnya pada hasil uji Hausman model terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect* karena nilai probabilitas *f-statistic* dibawah 5% (0.05) yaitu sebesar 0.0034. Untuk mencari model terbaik antara *Fixed Effect* dan *Random Effect* maka pengujian terakhir digunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM) dengan hasil model terbaik yang didapat adalah *Random Effect* karena nilai probabilitas *f-statistic* diatas 5% (0.05) yaitu sebesar 0.9933. oleh karena itu model yang terbaik digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4
Hasil Estimasi dan Pengujian Model PLS, FEM dan REM

No.	Variabel	Panel Least Square (PLS)	Fixed Effect Model (FEM)	Random Effect Model (REM)
1.	C	42134.03 (2.6334) [0.0111]*	755919.3 (8.9501) [0.0000]*	672511.9 (23.0265) [0.0000]*
2.	UMP	1.7671 (0.9355) [0.3538]*	-14.1494 (-1.8436) [0.0703]*	-2.6295 (-0.9001) [0.3721]*
3.	Adjusted R-Squared	-0.0022	0.0390	0.9036
4.	F-statistic	0.8803	3.3989	93.2533
5.	Prob (F-statistic)	0.3524	0.0703	0.0000
6.	Uji Chow			
	Statistic	1.1795		
	Probabilitas	0.3335		0.0556
	Prob (F-statistic)	0.3638		0.8135
7.	Uji Hausman			0.0034
	Chi-Sq. Statistic			
	Probabilitas			
	Prob (F-statistic)			
8.	Uji Lagrange Multiplier (LM)			
	Cross-section one-side		7.04E-05	
	Breusch-Pagan		0.9933	
	Model Random Effect			
9.	C		42134.03 (2.6334) [0.0111]	
10.	UMP		1.7671 (0.9355) [0.3538]	

signifikan $\alpha=5\%$; (.....) = nilai t-statistik; [.....] = nilai probabilitas

Sumber : data diolah, 2018

Setelah menentukan *Random Effect Model* (REM) sebagai model yang digunakan dalam metode PLS maka langkah selanjutnya yaitu mengestimasi model *Random Effect*. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi dibuktikan dengan koefisien sebesar 1.7671 dan nilai probabilitas sebesar 0.3538. Oleh karena itu apabila terjadi peningkatan UMP sebesar 1000 maka akan meningkatkan tenaga kerja sebesar 176 orang.

Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel independen dalam suatu model regresi. Apabila koefisien korelasi variabel yang bersangkutan nilainya terletak diluar batas penerimaan (*critical value*) maka koefisien korelasi bermakna dan terjadi multikolinearitas. Untuk mengetahui suatu variabel terkena multikolinearitas dapat digunakan suatu dasar keyakinan yaitu sebesar 0,8. Apabila angka yang didapatkan lebih besar dari 0,8 maka variabel tersebut terkena multikolinearitas begitu-pun pula sebaliknya jika hasil yang diperoleh kurang dari 0,8 maka variabel tersebut tidak terkena multikolinearitas. Berdasarkan Tabel dibawah, hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak adanya variabel yang terkena multikolinearitas karena angka dari setiap variabel kurang dari 0,8.

Heteroskedastisitas merupakan permasalahan sebuah model regresi dimana nilai *variance* tidak minimum. Masalah tersebut muncul disebabkan oleh karakteristik dari data *cross section* yang memiliki objek lebih dari satu, sehingga masing-masing data pada objek yang berbeda juga dipengaruhi oleh *Error Term* yang berbeda. Kondisi tersebut berdampak pada persebaran data yang tidak teratur. Model regresi yang baik adalah model yang homokedastisitas (tidak terjadi heteroskedastisitas). Kriteria yang digunakan adalah nilai probabilitas semua variabel lebih besar dari pada nilai ($\alpha=0.05$). Hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai probabilitas upah minimum provinsi sebesar 0.5432 dengan keseluruhan dianggap lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05 , maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu yang memiliki distribusi normal atau tidak. Dengan kata lain digunakan untuk mengetahui indikasi kenormalan data. Gujarati dan Porter (2009) menyatakan kelebihan dari data yang mengikuti distribusi normal yakni, nilai rerata dari *Error Term* bernilai nol. Pengaruh *Error Term* yang sangat kecil memiliki pengaruh besar terhadap hasil suatu regresi. Semakin kecil pengaruh *Error Term* maka akan semakin baik hasil regresi tersebut. Gujarati dan Porter (2009) juga menunjukkan keunggulan lain dari

Tabel 5
Hasil Uji Asumsi Klasik

No.	Asumsi Klasik	Probabilitas	Hasil
1.	Multikolinieritas	0.1260	Tidak terasumsi klasik
2.	Normalitas	0.2616	Tidak terasumsi klasik
3.	Heteroskedastisitas	0.5432	Tidak terasumsi klasik

Sumber : data diolah, 2018

data yang terdistribusi normal yaitu memiliki nilai *variance minimum* dan nilai *covariance* sama dengan nol. Data yang memiliki nilai dari *variance minimum* mengindikasikan bahwa *Error Term* dalam data tersebut memiliki sebaran yang sama (homokedastisitas). Sejalan dengan hal itu, data yang memiliki nilai *covariance* sama dengan nol, menunjukkan bahwa *Error Term* masing-masing variabel dalam model regresi tidak saling berhubungan. Oleh karenanya, distribusi normal sangat menentukan baik buruknya hasil sebuah regresi dalam penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak digunakan uji *Jarque-Bera (J-B test)*. Adapun kriteria pengujian *Jarque-Bera (J-B test)*, antara lain : a) Bila nilai JB hitung \geq nilai X^2 Tabel atau nilai probabilitas J-B hitung \leq nilai probabilitas ($\alpha=5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, *error term* adalah berdistribusi normal ditolak; b) Bila nilai JB hitung \leq nilai X^2 Tabel atau nilai probabilitas J-B hitung \geq nilai probabilitas ($\alpha=5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa *residual error term* adalah berdistribusi normal diterima. Berdasarkan hasil uji normalitas, menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 2.681247 , dan nilai probabilitas sebesar 0.261682 lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa model tersebut berdistribusi normal.

Pembahasan

Diskusi Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Upah dan tenaga kerja adalah sebuah pembahasan ekonomi yang terus menjadi suatu diskusi di kalangan ekonom dan peneliti. Pembatasan upah yang menjadi salah satu topik pembahasan di dalamnya yakni, kebijakan upah minimum. Peran upah minimum dalam pasar tenaga kerja dan perekonomian terjadi sebuah pandangan pro dan kontra baik secara teoritis maupun empiris (Herr, 2002; Kryriska dan Kopycinska, 2015).

Secara teoritis, terdapat beberapa pandangan yang memperdebatkan hubungan antara upah *minimum* dan tenaga kerja. Pandangan para ekonom Neoklasik menyatakan bahwa upah berperan penting terhadap pasar tenaga kerja, dimana upah ditentukan sama dengan produk marginal tenaga kerja (Bradley, 2007; Kryriska dan Kopycinska, 2015; Nikoloski, 2016). Pandangan tersebut menyatakan bahwa ketika upah dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif mengalami kenaikan, maka kenaikan tersebut akan berdampak pada penurunan pada sisi permintaan tenaga kerja (Fletwood, 2016). Bertolak belakang dengan teori tersebut, Keynes mengemukakan bahwa upah bukan merupakan faktor kunci yang memengaruhi permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja, sehingga apabila terjadi suatu kebijakan upah minimum dalam suatu perekonomian, maka hal tersebut kurang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Kalangan peneliti juga berdiskusi dan mencoba mencari tahu peran upah minimum terhadap lapangan kerja dengan data dan fenomena yang ada dan yang terjadi pada objek penelitian. Eldring dan Alsos (2012) telah mencoba meneliti hubungan tersebut dengan objek beberapa negara di Benua Eropa, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan upah *minimum* menyebabkan penurunan nilai pada pekerja dengan upah rendah (*low-quality*), dan akan menyebabkan pengusaha menekan permintaan pada tenaga kerja melalui seleksi yang lebih ketat, sehingga tenaga kerja *fresh graduate* akan memiliki peluang yang sangat kecil yang memiliki pengalaman kerja dan produktivitas yang rendah akan mengalami kesulitan mencari pekerjaan.

Sejalan dengan hal tersebut, Bishop (2018); Bodnar, dkk (2018) menekankan bahwa kenaikan upah *minimum* pada dasarnya tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat yang telah memiliki pe-

kerjaan, namun sangat berpengaruh kepada para pencari kerja, sehingga kondisi tersebut mencerminkan bahwa kenaikan tersebut memiliki dampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kontras dengan hasil tersebut, Hohberg dan Lay (2015); Menon dan Rodgers (2017); Vazquez, *dkk* (2017) justru menunjukkan hasil bahwa peningkatan upah *minimum* berpengaruh positif signifikan terhadap pekerja pada sektor formal dan sedikit berdampak negatif terhadap pekerja di sektor informal. Cengiz, *dkk* (2018) dengan objek yang berbeda juga menunjukkan hasil yang sama, bahwa penetapan upah *minimum* di Amerika Serikat hanya berpengaruh semu terhadap penurunan lapangan pekerjaan yang ditunjukkan dengan peningkatan lapangan pekerjaan dengan upah di atas upah *minimum* seiring penurunan lapangan pekerjaan yang diakibatkan dari penetapan upah *minimum* tersebut.

Peningkatan upah pekerja selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja, juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pasar tenaga kerja. Peningkatan upah *minimum* akan menyebabkan kenaikan pada biaya produksi, untuk menghindari kerugian, maka produsen akan mempertahankan pekerja dengan kualitas tinggi dan memberhentikan pekerja dengan kualitas rendah. Selain itu, produsen akan lebih selektif dalam memilih calon pekerja baru. Hal tersebut akan mendorong peningkatan kualitas angkatan kerja. Dalam sebuah pembangunan proyek konstruksi infrastruktur dimana memerlukan tenaga kerja yang memadai dan terqualifikasi secara tepat. Dengan program pembangunan dimana proyek konstruksi yang dilakukan pemerintah di setiap daerah di Jawa diharap dapat menyerap tenaga kerja secara efektif. Karena penyerapan tenaga kerja merupakan tolak ukur kesejahteraan manusia, karena dengan terserapnya tenaga kerja yang berimbang dengan pertumbuhan pen-

duduk, akan menekankan angka pengangguran di Indonesia.

Analisis deskriptif variabel penelitian menunjukkan hasil yang sama dengan analisis menggunakan metode *Panel Least Square* (PLS). Upah *Minimum* Provinsi (UMP) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif diterima. Apabila upah *minimum* meningkat maka penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi dapat dikatakan meningkat pula. Penelitian ini sesuai teori upah minimum yang dikemukakan oleh David Ricardo, bahwa tingkat upah yang diterima oleh tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan (*unskilled worker*) hanya dipengaruhi oleh kepentingan untuk menutup biaya hidup kebutuhan pekerja dan keluarganya. Jika tingkat upah naik di atas biaya hidup *minimum* pekerja, maka akan meningkatkan penawaran tenaga kerja dan akan menurunkan tingkat upah. Apabila tingkat upah berada di bawah biaya hidup *minimum* maka hal ini akan menurunkan kekuatan penawaran tenaga kerja (*labor force*). Dimana pada empirisnya tingkat upah sangat berpengaruh pada jenis pekerja dengan keahlian atau *supervisor*. Tetapi kurang berpengaruh kepada jenis pekerja yang tidak memiliki keterampilan atau hanya sebagai pelak-sana saja.

Adanya kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanfer *et al.* Pada tahun 2016 dengan judul penelitian *Wage on Employment: Meta-Analysis*. Dalam penelitiannya dapat ditarik suatu kesimpulan dimana Upah minimum nasional tidak berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja namun, untuk sub-kelompok tertentu yang berbeda menunjukkan efek yang merugikan untuk beberapa kelompok pasar tenaga kerja, seperti karyawan paruh waktu. Dalam penelitian tersebut karyawan paruh waktu dianggap tidak memberikan pengaruh yang baik dalam

tenaga kerja dan dianggap menunjukkan efek merugikan dalam penentuan upah minimum yang diberikan oleh tenaga kerja.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fachreza (2017) yang berjudul analisis penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 bahwa untuk variabel upah *minimum* memiliki pengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar 0.376859 yang artinya setiap kenaikan upah *minimum* sebesar Rp 1% maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.38%. Jumlah penyerapan tenaga kerja pada provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami fluktuasi. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yakni seperti tingkat upah, investasi daerah dan beberapa faktor lainnya. Upah *minimum* regional di provinsi Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan. Penetapan upah *minimum* Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tersebut didasarkan pada (KHM) kebutuhan Hidup Minimum. Upah *minimum* cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian Sumarsono (2003), upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi yang dapat mengakibatkan pengurangan ataupun penambahan jumlah penggunaan atau penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan Putra (2012) yang mengatakan "upah memiliki" pengaruh yang "positif signifikan" terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Fakta empiris Nilai upah rata-rata tenaga kerja pada perusahaan mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tergolong masih rendah yaitu sebesar Rp.879.353,93. Upah tersebut dapat dikatakan rendah karena nilai upah *minimum* regional di kota Semarang sebesar

Rp.991.000, sehingga apabila keduanya dibandingkan maka upah tersebut terlihat rendah. Rendahnya tingkat upah rata-rata ini dikarenakan sebagian besar industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ini merupakan industri dengan skala kecil hingga menengah. Tentu saja pemilik perusahaan tidak ingin merugi dengan adanya hal tersebut, sehingga pemilik perusahaan harus berani sedikit menaikkan harga jual produknya, yang tentu saja dengan harga yang masih terjangkau oleh masyarakat.

Namun berbeda dari hasil penelitian dari Zavodny (2000), dalam penelitiannya menganalisis mengenai adanya pengaruh upah *minimum*, jam kerja, dan tenaga kerja remaja menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dapat menurunkan tingkat tenaga kerja tetapi tidak mempengaruhi jam kerja baik di kalangan remaja yang bekerja atau semua remaja. Hasil tingkat individu tidak menunjukkan bahwa kenaikan upah *minimum* memiliki dampak negatif yang signifikan pada jam kerja oleh upah rendah remaja yang kemungkinan akan terpengaruh oleh kenaikan upah *minimum*. Hasilnya menunjukkan bahwa tenaga kerja remaja dengan upah rendah cenderung tetap bekerja, relatif terhadap tenaga kerja remaja dengan upah tinggi, ketika upah *minimum* dinaikkan. Namun, efek buruk ini hilang ketika tenaga kerja remaja dengan upah rendah ini dibandingkan dengan tenaga kerja remaja upah rendah lainnya selama periode ketika upah *minimum* tidak meningkat.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lang dan Kahn (1998). Dalam penelitiannya, Menunjukkan bahwa dalam hukum upah *minimum* terdapat persaingan yang semakin meningkat dari produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi sehingga membuat produktivitas tenaga kerja yang lebih rendah menjadi lebih buruk tanpa membuat produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi menjadi lebih baik. Kami memberikan bukti bahwa hukum upah *minimum*

mengalihkan pekerjaan dari orang dewasa ke remaja dan siswa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang konsekuensi distribusi dari upah *minimum* bahkan ketika mereka meningkatkan pekerjaan.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Hasil analisis deskriptif pergerakan dinamika ketenagakerjaan pada ke enam provinsi di pulau Jawa antara lain: Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2006 hingga 2015 baik itu dalam konteks tenaga kerja konstruksinya ataupun upah *minimumnya*. Upah *minimum* provinsi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja tahun 2006-2015. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif diterima.

Daftar Pustaka

- Adi, H.P dan Adillah, S.U. 2012. Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sebagai Unsur Pendukung Pembangunan Infrastruktur. Universitas Islam Sultan Agung
- Badan Pusat Statistik. 2017. Jumlah Pekerja Tetap Konstruksi Menurut Provinsi. BPS Indonesia. <https://www.bps.go.id/> [Diakses pada Desember 2017].
- Badan Pusat Statistik. 2017. Upah Minimum Provinsi. BPS Indonesia. <https://www.bps.go.id/> [Diakses pada Desember 2017].
- Badan Pusat Statistik. 2017. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu. BPS Indonesia. <https://www.bps.go.id/> [Diakses pada Desember 2017].
- Bodnar, K., Fadejeva, L., Lordache, S., Malk, L., Paskaleva, D., Pesliakaite, J., Jemec, N.T., Toth, P., Wyszyski, R. 2018. How do Firms Adjust to Rises in the Minimum Wage? Survey Evidence from Central and Eastern Europe. *Working Paper Series*, No. 2122.
- Bradley, M.E. 2007. Efficiency Wages and Classical Wage Theory. *Journal of the History of Economic Thought*. Vol. 29. Halaman: 167 – 188.
- Cengis, D., Dube, a., Linder, A., Zipperer, B. 2018. The Effect of Minimum Wages on Low – Wage Jobs: Evidence from the United States Using a Bunching Estimator. *CEP Discussion Paper*. No. 1531.
- Eldring, L., Alsos, K. 2012. European Minimum Wage: A Nordic Outlook. *Fafo Report*. Vol. 16.
- Fachreza, A. N. 2017. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No. 2. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fletwood, S. 2016. Reflection Upon Neoclassical Labour Economics. University of the West of England
- Gujarati, D.N. dan D. C. Porter. 2009. *Basic Econometrics. 5th ed.* New York: McGraw-Hill Irwin.
- Hafner, M., Taylor, J., Pankowska P., Stepanek, M., Nataraj, S., dan Stolk, C. V. 2016. The Impact of the National Minimum Wage on Employment: A Meta-Analysis. *Research Report RAND Europe*, October, 1-38.
- Herr, H. 2002. Wages, Employment and Prices. *Working Papers of the Business Institute Berlin*. No. 15
- Hohberg, M., Lay, J. 2015. The Impact of Minimum Wages on Informal and Formal Labor Market Outcomes: Evidence from Indonesia. *IZA Journal of Labor*

and Development, Vol. 4, No. 14.

- Jakstiene, S. 2010. Labour Market Segmentation: Theoretical Aspect. *Ekonomika ir Vadyba: Aktualijos ir Perspektyvos*. Vol. 4, No. 20, Halaman: 53 - 63.
- Juanda, B., Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press.
- Kryriska, E., Kopycinska, D. 2015. Wages in Labour Market Theories. *Folia Oeconomica Stetinensia*.
- Kumas, H., Caglar, A., Kataalp. H.S. 2014. Firm Size and Labour Market Segmentation Theory: Evidence from Turkish Micro Data. *Procedia – Social and Behaviour Sciences*. Vol. 150, Halaman: 360 – 373.
- Lang, K dan Kahn, S. 1998. The Effect of Minimum-Wage Laws on The Distribution of Employment: Theory and Evidence. *Journal of Public Economics* 69 (1998) 67–82.
- Merdekawaty, R., Ispriyanti, D., Sugito. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR). *Journal Gaussian*, Vol. 5, No. 3, Halaman: 525 – 534.
- Menon, N dan Rodgers, Y. V. D. M. 2017. Child labor and the Minimum Wage: Evidence from India. *Journal of Comparative Economics*.
- Putra, R. E. 2012. Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Economics Development Analysis Journal* 1 (2) (2012).
- Sumarsono, S. 2003. *Ekonomi manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.